

# LAPORAN

**KERJA**

**BULAN JULI  
2023**



**MELKY J. PANGEMANAN, S.IP., MAP., M.Si**  
**ANGGOTA DPRD**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**KETUA DPW PSI SULAWESI UTARA**



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



Senin, 3 Juli 2023

14.30 - 17.20 Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Prakarsa Gubernur tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Jamkrida Sulawesi Utara sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Buah Ranperda tersebut serta Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi, di ruangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

### SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

(Dibacakan oleh Wakil Gubernur)

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih dianugerahkan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam rangka menunaikan tugas dan tanggung jawab kita semua, khususnya perihal penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 dan Ranperda Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Sulut.

Sehubungan dengan itu, Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas pelaksanaan Rapat Paripurna ini. Selanjutnya, pada kesempatan berbahagia ini, ada dua hal yang menjadi topik inti dalam rapat paripurna DPRD yang kita laksanakan bersama. Pertama, terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022; dan yang kedua adalah Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Sulawesi Utara. Untuk itu ijin Saya untuk menjelaskannya secara ringkas dari sudut pandang Pemerintah Daerah demi keberlanjutan dan paripurnanya seluruh agenda pembahasan dari kedua Ranperda ini yang sudah melalui beberapa tahapan proses tentunya.

Bapak/Ibu, Saudara-Saudari, Hadirin yang Saya hormati, Selaku Gubernur Sulawesi Utara, sekaligus penanggungjawab atas keberlangsungan dan keberlanjutan roda Pemerintahan daerah ini, kami menyadari betapa pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam melaporkan penggunaan dana publik kepada seluruh stakeholders, khususnya yang telah dilaksanakan Pemprov Sulut pada anggaran APBD 2022.

Untuk itu, Saya dengan bangga ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami telah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui APBD tahun 2022, kami telah mengalokasikan dana untuk berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya, serta memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Perlu diketahui Daerah T.A. 2022 bersama, Pendapatan terealisasi sebesar Rp.3.726.578.804.936. (Tiga Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan

Bersambung ●



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116





Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), atau 95,65% dari anggaran Rp. 3.896.225.159.207 (Tiga Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah). Sedangkan untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp. 3.858.758.102.783. (Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau 92,59% dari anggaran Rp.4.167.727.804.692. (Empat Triliun Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Tentunya, berbagai program dan proyek yang dijalankan dengan dana APBD tahun 2022 telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulawesi Utara. Dalam kurun waktu tersebut, kami berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, kami juga telah melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran demi memastikan akuntabilitas yang tinggi. Peran dan kontribusi DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Melalui berbagai masukan dan saran bernilai konstruktif yang diberikan oleh DPRD, sangat berarti bagi kami dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pada tahun ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kesembilan kalinya, secara berturut-turut.

Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana publik. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, khususnya melalui kesempatan ini terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 untuk segera dirampungkan dan ditetapkan bersama.

Bapak/Ibu, Saudara-Saudari, Hadirin yang Saya hormati, Selanjutnya, terkait Ranperda Penyertaan Dana kepada PT. Jamkrida Sulut, tentunya hal ini menjadi sebuah pembahasan yang cukup alot untuk dibahas dan ditetapkan, karena setiap butir regulasi peraturannya harus dipersiapkan secara matang dan detail, jangan ada yang saling merugikan, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, PT. Jamkrida Sulut mampu menjawab sinergitas dan amanah yang diberikan Pemerintah Provinsi untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Dapat dijelaskan juga, dalam penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Sulut merupakan langkah yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor keuangan di wilayah kita. Dalam rangka meningkatkan peran PT. Jamkrida Sulut sebagai lembaga penjaminan kredit yang handal dan berkompeten, kami berencana untuk menyuntikkan modal ke dalam perusahaan ini. Dalam hal ini, tujuan utama kami adalah untuk memberikan dorongan dan dukungan finansial yang lebih kuat kepada perusahaan ini, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Sulawesi Utara.

Bersambung ●



Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah kita. Namun, seringkali mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, PT. Jamkrida Sulut memiliki peran krusial dalam memberikan jaminan kredit dan memfasilitasi akses keuangan bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang. Dengan melakukan penyertaan modal ke PT. Jamkrida Sulut, kami berharap perusahaan ini dapat lebih memperluas cakupannya, meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan jaminan kredit, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha di Sulawesi Utara. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi iklim investasi di daerah kita, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah.

Kami telah melakukan kajian dan evaluasi yang komprehensif terkait Ranperda ini, termasuk analisis keuangan dan risiko yang terkait. Kami yakin bahwa penyertaan modal ini akan memberikan hasil yang positif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi PT. Jamkrida Sulut dan masyarakat Sulawesi Utara secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan Ranperda ini, kami akan tetap berkomitmen untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Kami akan memastikan bahwa PT. Jamkrida Sulut dikelola secara profesional dan efisien, serta memberikan laporan berkala kepada pihak terkait, termasuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mengenai perkembangan dan hasil dari penyertaan modal ini.

Bapak/Ibu, Hadirin sekalian, Kiranya, penjelasan yang Saya sampaikan menjadi sebuah penegasan, bahwasanya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senantiasa memegang teguh komitmen dan dedikasi, serta bertanggungjawab penuh demi kebaikan dan kemajuan bersama. Selanjutnya, perwujudan dari kedua Ranperda yang dikaji, dibahas dan disampaikan, dipastikan akan memberi pengaruh dan mampu menjawab persoalan-persoalan dalam proses tumbuh kembang daerah Sulawesi Utara. Karena itu, diharapkan kedua Ranperda ini dapat menjadi Perda, arah, maksud dan tujuannya akan kita wujudkan bersama, hingga nantinya dapat membawa dampak signifikan terhadap progres pembangunan di daerah ke arah yang lebih maju tentunya, untuk Sulawesi Utara yang semakin maju dan sejahtera.

Demikian yang dapat Saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, menyertai kita dalam tugas dan tanggung jawab kita, memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara.

Anggota DPRD MJP menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPRD. Pelaksanaan Rapat Paripurna khusus untuk substansi Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Prakarsa Gubernur tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Jamkrida Sulawesi Utara cacat formal.

Pasal 38 ayat 2 huruf c Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur persetujuan bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA).

Rapat BAPEMPERDA bersama Biro Hukum dan Perangkat Daerah Pengusul Ranperda Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Sulawesi Utara belum mengambil keputusan dan persetujuan bersama. BAPEMPERDA men-skors Rapat bersama Biro Hukum dan Perangkat Daerah Pengusul Ranperda.

BAPEMPERDA masih meminta data/dokumen pendukung untuk memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut.

MJP mengingatkan bahwa Ranperda tentang Pendirian PT Jamkrida masih dalam tahap konsultasi dan nantinya masuk tahap fasilitasi di Kemendagri. Bagaimana mungkin membahas tentang penyertaan modal untuk PT Jamkrida sementara Ranperda tentang Pendirian PT Jamkrida belum ditetapkan.

Anggota DPRD MJP mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi untuk mengakselerasi lahirnya produk hukum daerah tentang pendirian PT Jamkrida dan Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida Sulawesi Utara. Dengan adanya PT Jamkrida diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan memperlancar kegiatan koperasi dan UMKM melalui penjaminan kredit serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara namun jangan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.





# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

SELASA, 4 JULI 2023

**MJP** MELAYANI  
JUJUR  
PROGRESIF

Selasa, 4 Juli 2023

13.30 - 16.00 Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) bersama Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara terkait penambahan Ranperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA), di ruangan Rapat BAPEMPERDA DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun Ranperda yang disampaikan oleh Biro Hukum Setda kepada BAPEMPERDA untuk mendapatkan persetujuan bersama, yakni:

\* **Ranperda tentang PT Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara**

Peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mendukung perekonomian Provinsi Sulawesi Utara sangat signifikan, namun di sisi lain Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menghadapi kendala dari segi permodalan, di samping kendala-kendala pemasaran, manajemen, sumber daya manusia dan teknologi, maka pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

\* **Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Sulawesi Utara**

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penjaminan kredit dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu menyertakan modal pada PT. Jamkrida Sulawesi Utara.

\* **Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara**

Bahwa dinamika pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggungjawab yang berbasis keunggulan lokal, maka pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.

\* **Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat tanp mengesampingkan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan turut menunjang kesejahteraan masyarakat pada aspek lainnya, maka pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 - 2052.

Bersambung ●



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

SELASA, 4 JULI 2023

**MJP** MELAYANI  
JUJUR  
PROGRESIF



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116

Senin, 10 Juli 2023

12.45 - 18.20 Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Sekretariat DPRD, di ruangan Rapat Komisi I.

Pembahasan terkait optimalisasi kerja Sekretariat DPRD pada awal triwulan ketiga tahun 2023.

Komisi I mendorong Sekretariat untuk mengoptimalkan kinerja sesuai tupoksi. Pelayanan kepada masyarakat menjadi tugas utama serta peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.





## LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

SELASA, 11 JULI 2023

**MJP** MELAYANI  
JUJUR  
PROGRESIF

Selasa, 11 Juli 2023

Anggota DPRD MJP bekerja dari rumah (Work From Home). Koordinasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) dan Tim Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait progres 5 (Lima) Ranperda inisiatif DPRD yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

1. Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Ranperda tentang Pengembangan dan Pelestarian Danau Tondano;
3. Ranperda tentang Kerukunan antar Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Utara;
4. Ranperda tentang Pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA);
5. Ranperda tentang Jaringan Utilitas.



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



Kamis, 13 Juli 2023

10.30 - 12.40 Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta.

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD.

**\* Dasar Hukum**

Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut – tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Menteri. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- \* Prinsip-Prinsip Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Pasal 4 Permendagri 86 tahun 2017
  - Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
  - Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
  - Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
  - Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

**\* Arsitektur Dokumen Rencana Pembangunan Daerah**

- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD
- Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD
- Seluruh program selama lima tahun dalam Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

Pasal 12 Ayat 3 Permendagri 86 tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bersambung ●



# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

KAMIS, 13 JULI 2023

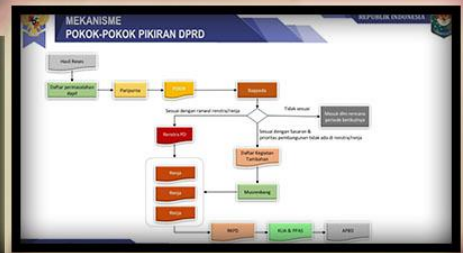
## \* Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 161 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

Pasal 78 ayat 2 Permendagri 86 tahun 2017, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pasal 178 Permendagri 86 tahun 2017 ;

1. Merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
2. Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
3. Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
4. Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
5. Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.





# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

JUMAT, 14 JULI 2023

**MJP** MELAYANI  
JUJUR  
PROGRESIF

Jumat, 14 Juli 2023

08.30 - 15.30 Pertemuan Forum Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara serta Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, di The Sentra Hotel, Minahasa Utara.

Pertemuan dalam rangka membangun sinergitas kelembagaan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRD.

- \* **Pembukaan :**
  - Laporan Panitia : Ir. Sandra Moniaga, M.Si (Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara)
  - Sambutan DPRD : dr. Fransiscus A. Silangen, SpB-KBD (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara)
- \* **Materi I : Data Kependudukan terkait Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024**
  - Narasumber : Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI)
  - Moderator : Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si (Wakil Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Sulawesi Utara)
- \* **Materi II : Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah**
  - Narasumber : Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri RI)
  - Moderator : Fabian Kaloh, S.IP., M.Si (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara)
- \* **Diskusi/Penyusunan Rekomendasi**
- \* **Penutupan**
  - Sambutan DPRD : dr. Fransiscus A. Silangen, SpB-KBD (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara)





# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

JUMAT, 14 JULI 2023

**MJP** MELAYANI JUJUR PROGRESIF



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116





**SENIN**

**17 JULI 2023**

**MJP** MELAYANI JUJUR PROGRESIF

Senin, 17 Juli 2023

Ibadah rutin Anggota DPRD bersama Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, di ruangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Mengawali kerja pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara di pekan berjalan ini dengan beribadah, berdoa dan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karuniaNya.

**Khadim oleh Pdt. Stanley Kansil, M.Th**

Tuhan memberkati Sulawesi Utara dan Indonesia !



**MJP** MELAYANI JUJUR PROGRESIF



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116

Senin, 17 Juli 2023

13.00 - 14.30 Rapat Internal Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, di ruangan Rapat BAPEMPERDA.

Pembahasan terkait 4 (empat) Ranperda yang disampaikan oleh Biro Hukum Setda kepada BAPEMPERDA :

1. Ranperda tentang PT Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara
2. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Sulawesi Utara
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
4. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAPEMPERDA telah menyetujui empat Ranperda tersebut untuk ditambahkan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun 2023.

Pasal 38 ayat 2 huruf c Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur persetujuan bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA).

Selanjutnya membahas progres 5 (Lima) Ranperda inisiatif DPRD yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

1. Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Ranperda tentang Pengembangan dan Pelestarian Danau Tondano;
3. Ranperda tentang Kerukunan antar Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Utara;
4. Ranperda tentang Pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA);
5. Ranperda tentang Jaringan Utilitas.



Selasa, 18 Juli 2023

09.30 - 10.00 Rapat Internal Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, di ruangan Rapat BAPEMPERDA.

Pembahasan terkait Ranperda tentang Pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah urusan yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.





11.00 - 12.25 Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024, di ruangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

#### SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga hari ini kita dapat dipersatukan pada Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, serta Penyampaian/Penjelasan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Dimana kedua agenda yang kita laksanakan dan bahas pada kesempatan ini menjadi bagian penting dan strategis bagi keberlanjutan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, juga sebagai bentuk konkrit atas dedikasi dan komitmen bersama untuk terus menjaga nilai akuntabilitas dan transparansi terhadap perencanaan dan penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan regulasi peraturan yang sah, seperti halnya ditunjukkan dalam Penetapan Keputusan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2022, sekaligus Penjelasan Rancangan KUA dan PPAS Provinsi Sulut T.A. 2024.

Bapak/Ibu, Hadirin yang Saya hormati, Secara eksplisit pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2022 telah dilaksanakan secara baik, akuntabel, transparan, serta sesuai kaidah- kaidah atau regulasi penggunaannya, demi mencapai output dan outcome yang bernilai guna, bagi pembangunan dan kemajuan daerah ini.

Hari ini, sebagai lanjutan untuk menuntaskan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2022, kita bersama-sama melaksanakan pengambilan keputusan tentang Ranperda yang telah melalui proses pembahasan diantara Pihak Legislatif dan juga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, Saya memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang telah bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen untuk saling mendukung di dalam menyelesaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2022 ini.

Saya yakin dan percaya, seluruh data yang telah dianalisa dan dikaji bersama, serta berbagai penjelasan argumentatif yang telah disampaikan pada setiap rangkaian pembahasan, mampu melahirkan keputusan paripurna yang pada muaranya merampungkan dan menetapkan Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah. Besar harapan Saya, keterkaitan dan rutinitas dalam penyusunan, penyelenggaraan, bahkan pertanggungjawaban APBD yang selama ini kita laksanakan dari waktu ke waktu, dapat terus dilaksanakan secara profesional dan proporsional sekaligus dapat meningkatkan dedikasi dan komitmen kita semua, untuk terus melaksanakan, mengawal, dan menjaga penggunaan APBD secara berkesinambungan, berskala prioritas, objektif, serta akuntabel, demi mensukseskan program dan kebijakan strategis yang telah disepakati, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulawesi Utara.

Bapak/Ibu, Hadirin yang Saya hormati, Dalam rapat paripurna ini juga teragenda penyampaian KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana kita

Bersambung ●



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116





ketahui bersama bahwa KUA-PPAS merujuk pada Tema RKP 2024, yang terumus ke dalam delapan arah kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  - 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
  - 3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
  - 4) Penguatan Daya Saing Usaha;
  - 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
  - 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
  - 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; Serta
- Pelaksanaan Pemilu 2024. Sejalan juga dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, hingga Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024 nanti difokuskan pada upaya “Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan Pemilu”, dengan 7 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:
    - 1) Pembangunan yang berwawasan lingkungan;
    - 2) Pemerataan Pembangunan;
    - 3) Penanggulangan Kemiskinan;
    - 4) Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
    - 5) Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
    - 6) Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah; dan
    - 7) Stabilitas Daerah yang terjamin.
  - Kebijakan Umum APBD (KUA) T.A. 2024 ini, merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024. Adapun latar belakang dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA T.A. 2024, salah satunya didasari dan mempertimbangkan dinamisasi kondisi perekonomian baik dalam skala nasional maupun global.

Terdapat isu perkembangan ekonomi dunia yang diwarnai sentimen resesi ekonomi global yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain krisis energi di negara-negara Eropa, yang secara tidak langsung memicu pertumbuhan ekonomi negatif bagi sebagian negara di dunia. Seperti yang kita hadapi dan rasakan, salah satu isu utama perkembangan ekonomi dunia dipenghujung tahun 2022 sampai 2023 adalah tingkat inflasi yang tinggi sangat mempengaruhi perekonomian global dan termasuk kebijakan yang diambil, yang juga berdampak pada Negara Indonesia, sehingga mempengaruhi kebijakan keuangan daerah.

Meskipun demikian, kita harus tetap bangga dan optimis dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2022 dan 2023, serta laju inflasi yang mampu kita kendalikan, serta diharapkan pada penghujung tahun 2023 dan 2024 akan lebih baik lagi melalui optimalisasi program dan kebijakan strategis yang telah direncanakan.

Untuk itu, besar harapan Saya kiranya Kebijakan Umum APBD yang nantinya akan dibahas dan disepakati, dapat menjadi acuan yang komprehensif untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024. Rencana Target Ekonomi Makro untuk tahun 2024, diantaranya:

Bersambung ●



1. Pertumbuhan Ekonomi berada dikisaran 5,0 - 5,5%;
2. Inflasi dapat dikendalikan pada angka 3±1%;
3. Kemiskinan pada angka 6,2 - 7,0%;
4. Pengangguran pada angka 6,1 – 6,4%; dan
5. Indeks Pembangunan Manusia dapat dipertahankan pada angka 74,5.

Selanjutnya, terkait substansi rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah, ditargetkan sebesar Rp.3.788.354.667.624,- (Tiga Triliun, Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar, Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta, Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu, Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
2. Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp.3.499.312.062.376,- (Tiga Triliun, Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar, Tiga Ratus Dua Belas Juta, Enam Puluh Dua Ribu, Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
3. Pembiayaan Daerah, meliputi:
  - a) Penerimaan Pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah).
  - b) Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula Rp.324.042.605.248,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Miliar, Empat Puluh Dua Juta, Enam Ratus Lima Ribu, Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Disampaikan pula bahwa APBD tahun 2024 sesuai ketentuan akan dialokasikan anggaran untuk mendukung sukses Pilkada serentak tahun 2024. Karena itu dalam KUA dan PPAS ini telah dialokasikan kebutuhan anggaran untuk mensukseskan agenda demokrasi Nasional tersebut.

Bapak/Ibu, Hadirin yang Saya hormati,

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Kiranya Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2022 yang ditetapkan hari ini dapat memicu dan memacu langkah kita ke depan untuk melakukan yang terbaik, termasuk dalam pembahasan KUA dan PPAS APBD T.A. 2024. Mari kita terus bersinergi. Kita terus bangun dan lebih majukan daerah ini. Kita sejahterakan semua masyarakat Sulawesi Utara.

Anggota DPRD MJP menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPRD. Adapun 3 (tiga) poin yang disampaikan MJP:

- Mengkritisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022 yang menempatkan Sulawesi Utara di peringkat 22 dengan skor 3.15. Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
- Mendorong Pemerintah Provinsi untuk kembali memperbaiki talud yang ambruk di Ruas Jalan Tatelu - Danowudu, tepatnya di Kelurahan Apela Dua. Pada awal tahun 2022 jalan tersebut mengalami longsor dan saat itu langsung dibangun talud oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pada akhir tahun 2022 pengerjaannya selesai tetapi belum lama ini talud tersebut sudah ambruk lagi.
- Mengingatkan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat

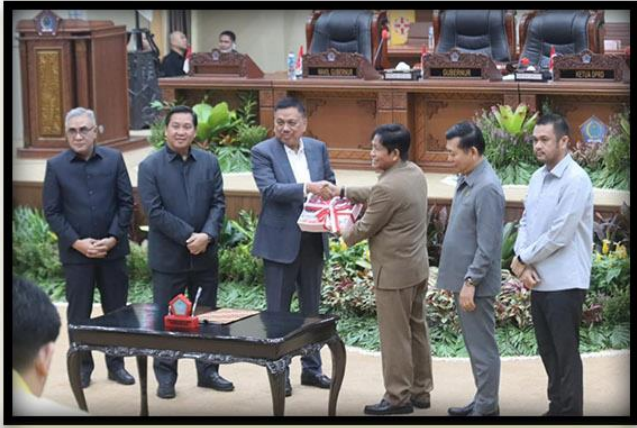
Bersambung ●



# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

SELASA, 18 JULI 2023

**MJP** MELAYANI JUJUR PROGRESIF



**MJP** MELAYANI JUJUR PROGRESIF



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



**MJP** MELAYANI  
JUJUR  
PROGRESIF

**RABU**  
**19 JULI 2023**



Selamat  
**Tahun Baru  
Islam**

**1 Muharram 1445 H / 2023**  
**19 Juli 2023**

**MELKY J. PANGEMANAN, S.IP., MAP., M.Si**  
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA / KETUA DPW PSI SULAWESI UTARA



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116

SELAMAT TAHUN BARU ISLAM, 1 MUHARRAM 1445 H  
LANGKAH OPTIMIS UNTUK PERUBAHAN BERAWAL  
DARI NIAT MENUJU KEBAIKAN



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



**Kamis, 20 Juli 2023**

**14.00 - 15.00 Anggota DPRD MJP bersama staf pendamping mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023, di ruangan kerja Anggota DPRD MJP.**

**Komponen biaya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah yang tertata dalam DPA adalah:**

- a. Biaya Narasumber Rp. 6.000.000 selama 6 jam untuk 2 kegiatan;**
- b. Biaya Moderator, Rp. 1.400.000 untuk 2 kegiatan**
- c. Biaya MC Rp.800.000 untuk 2 kegiatan**
- d. Belanja Sewa Meubel, Rp. 1.500.000 untuk 2 tempat (PPn sebesar 11% dan PPh 23 sebesar 2%);**
- e. Belanja Makan/Minum Rp. 5.500.000 untuk makan prasmanan/kotak, 2 kegiatan (PPh 23 sebesar 2%);**
- f. Pengganti Transportasi bagi peserta, Rp. 10.000.000 untuk 100 orang @Rp.100.000 per orang (untuk hari pertama 50 orang dan hari kedua 50 orang);**
- g. ATK, cetak penggandaan (disiapkan oleh Sekretariat DPRD).**

**Disamping itu kepada Anggota DPRD dan staf pendamping diberikan Perjalanan Dinas dan Dana Sosialisasi melalui transfer kepada staf pendamping atau pihak ketiga.**

**Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan secara perorangan di daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.**





Jumat, 21 Juli 2023

14.00 - 17.15 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD MJP dilaksanakan di Desa Treman Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

Sosialisasi diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi dan kaum muda Kecamatan Kauditan.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disosialisasikan adalah:

- Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan penjangkangan aspirasi publik pada penyusunan Ranperda berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis.

**ANGGARAN/DANA SOSRANPERDA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA**

- \* Biaya Narasumber Rp. 6.000.000 selama 6 jam untuk 2 kegiatan;
- \* Biaya Moderator, Rp. 1.400.000 untuk 2 kegiatan
- \* Biaya MC Rp.800.000 untuk 2 kegiatan
- \* Belanja Sewa Meubel, Rp. 1.500.000 untuk 2 tempat (PPn sebesar 11% dan PPh 23 sebesar 2%)
- \* Belanja Makan/Minum Rp. 5.500.000 untuk makan prasmanan/kotak, 2 kegiatan (PPh 23 sebesar 2%)
- \* Pengganti Transportasi bagi peserta, Rp. 10.000.000 untuk 100 orang @Rp.100.000 per orang (untuk hari pertama 50 orang dan hari kedua 50 orang);

ATK, cetak pengandaan disiapkan oleh Sekretariat DPRD. Setiap Anggota DPRD mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 370.000 (Daerah Minahasa Utara dan Bitung) serta uang representasi Rp. 75.000.

Pada Kegiatan SOSRANPERDA hari Jumat, (21/07/2023) telah digunakan anggaran sebagai berikut:

- Belanja Makan Minum (Makanan Kotak) Rp. 55.000 x 50 Orang = Rp. 2.750.000
- Jasa Sewa Meubel = Rp. 750.000
- Uang Transport Peserta Rp. 100.000 x 50 Orang = Rp. 5.000.000
- Narasumber = Rp. 2.700.000
- Moderator = Rp. 700.000
- MC = Rp. 400.000

Total: Rp. 12.300.000

Bersambung ●



# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

## JUMAT, 21 JULI 2023

**MJP** MELAYANI JUJUR PROGRESIF



**MJP** MELAYANI JUJUR PROGRESIF



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

SENIN, 24 JULI 2023

**MJP** MELAYANI  
JUJUR  
PROGRESIF

Senin, 24 Juli 2023

10.00 - 13.00 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD MJP dilaksanakan di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

Sosialisasi diikuti oleh Komunitas Wanita dalam wadah pelayanan Wanita Kaum Ibu (WKI) GMIM Eben Haezer Watutumou.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disosialisasikan adalah:

- Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan penjangkangan aspirasi publik pada penyusunan Ranperda berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis.

## ANGGARAN/DANA SOSRANPERDA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

- Biaya Narasumber Rp. 6.000.000 selama 6 jam untuk 2 kegiatan;
- Biaya Moderator, Rp. 1.400.000 untuk 2 kegiatan
- Biaya MC Rp.800.000 untuk 2 kegiatan
- Belanja Sewa Meubel, Rp. 1.500.000 untuk 2 tempat (PPn sebesar 11% dan PPh 23 sebesar 2%)
- Belanja Makan/Minum Rp. 5.500.000 untuk makan prasmanan/kotak, 2 kegiatan (PPh 23 sebesar 2%)
- Pengganti Transportasi bagi peserta, Rp. 10.000.000 untuk 100 orang @Rp.100.000 per orang (untuk hari pertama 50 orang dan hari kedua 50 orang);

ATK, cetak pengandaan disiapkan oleh Sekretariat DPRD. Setiap Anggota DPRD mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 370.000 (Daerah Minahasa Utara dan Bitung) serta uang representasi Rp. 75.000.

Pada Kegiatan SOSRANPERDA hari Senin, (24/07/2023) telah digunakan anggaran sebagai berikut:

- Belanja Makan Minum (Makanan Kotak) Rp. 55.000 × 50 Orang = Rp. 2.750.000
- Jasa Sewa Meubel = Rp. 750.000
- Uang Transport Peserta Rp. 100.000 x 50 Orang = Rp. 5.000.000
- Narasumber = Rp. 2.700.000
- Moderator = Rp. 700.000
- MC = Rp. 400.000

Total : Rp. 12.300.000

Bersambung ●



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

SENIN, 24 JULI 2023



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



Selasa, 25 Juli 2023

11.00 - 13.15 Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, di Jakarta.

Kunjungan kerja DPRD dalam konsultasi dan koordinasi terkait Revisi Undang-Undang Desa Mengubah Periodisasi Jabatan Kepala Desa.

Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun salah satu poin krusial yang disetujui adalah masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun. Keputusan tersebut masih sebatas persetujuan draf revisi UU Desa menjadi usulan inisiatif DPR.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebelumnya juga telah mempersiapkan kajian akademik penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun dalam satu periode.

Menurut Kemendes PDTT, penambahan masa jabatan tersebut sengaja diusulkan karena selama ini Kepala Desa dinilai kurang efektif bekerja untuk membangun desa, karena menghabiskan waktu yang panjang untuk rekonsiliasi pasca pemilihan.

Berdasarkan hasil kajian akademik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik akibat Pilkades membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, begitu juga menyiapkan Pilkades berikutnya butuh waktu satu tahun. Diharapkan dengan penambahan masa jabatan Kepala Desa akan lebih efektif karena waktunya tidak lagi dihabiskan menyelesaikan konflik akibat Pilkades. Publik tidak perlu khawatir dengan gagasan periode sembilan tahun, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk. Masyarakat desa tidak perlu menunggu selama sembilan tahun untuk mengganti Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong Pemerintah bersama DPR RI untuk melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya dalam proses pembahasan dan melakukan kajian secara komprehensif bersama para pakar diberbagai bidang terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.



Rabu, 26 Juli 2023

15.00 - 17.00 Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta.

Kunjungan kerja DPRD dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Utilitas yang merupakan usulan dari Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Ranperda tentang Utilitas masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun 2023.

Penataan jaringan utilitas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan penataan ruang di suatu wilayah. Pengaturan pemanfaatan jaringan utilitas harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah dan penataan jaringan utilitas.

Pengaturan dalam produk hukum daerah mengenai jaringan utilitas memiliki tujuan terciptanya wilayah tata ruang yang aman, berestetika dan nyaman bagi masyarakat.

Produk hukum daerah yang mengatur penyelenggaraan jaringan utilitas harus memperhatikan peraturan perundangan yang secara hierarkis lebih tinggi dan peraturan yang aplikatif serta solutif untuk menjawab permasalahan penataan dan pemanfaatan jaringan utilitas.





Kamis, 27 Juli 2023

15.30 - 17.20 Anggota DPRD MJP bersama staf pendamping menyelesaikan Laporan Administrasi dan Keuangan dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023, di ruangan kerja Anggota DPRD MJP.

**ANGGARAN/DANA SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA**

1. Belanja Makan Minum = Rp. 5.500.000 (Ditransfer ke Staf Pendamping)
2. Jasa Sewa Meubel = Rp. 1.500.000 (Ditransfer ke Staf Pendamping)
3. Uang Transport Peserta = Rp. 10.000.000 (Ditransfer ke Staf Pendamping)
4. Narasumber = Rp. 6.000.000 (Ditransfer langsung)
5. Moderator = Rp. 1.400.000 (Ditransfer langsung)
6. MC = Rp. 800.0000

ATK, cetak penggandaan disiapkan oleh Sekretariat DPRD. Setiap Anggota DPRD mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 370.000 dan uang representasi Rp. 75.000.

Pada Kegiatan Sosialisasi hari Jumat (21/07/2023) telah digunakan anggaran sebagai berikut :

- Belanja Makan Minum (Makanan Kotak) Rp. 55.000 × 50 Orang = Rp. 2.750.000
- Jasa Sewa Meubel = Rp. 750.000
- Uang Transport Peserta Rp. 100.000 x 50 Orang = Rp. 5.000.000
- Narasumber = Rp. 2.700.000
- Moderator = Rp. 700.000
- MC = Rp. 400.000

Jumlah : Rp. 12.300.000

Pada Kegiatan Sosialisasi hari Senin (24/07/2023) telah digunakan anggaran sebagai berikut :

- Belanja Makan Minum (Makanan Kotak) Rp. 55.000 × 50 Orang = Rp. 2.750.000
- Jasa Sewa Meubel = Rp. 750.000
- Uang Transport Peserta Rp. 100.000 x 50 Orang = Rp. 5.000.000
- Narasumber = Rp. 2.700.000
- Moderator = Rp. 700.000
- MC = Rp. 400.000

Jumlah : Rp. 12.300.000

TOTAL : Rp. 24.600.000

Anggota DPRD MJP bersama staf pendamping mempersiapkan kembali pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2023.

Bersambung ●



MJP akan menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah pada hari Jumat, 28 Juli dan hari Senin, 31 Juli 2023.

Komponen biaya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah yang tertata dalam DPA adalah:

- Biaya Narasumber Rp. 6.000.000 selama 6 jam untuk 2 kegiatan;
- Biaya Moderator, Rp. 1.400.000 untuk 2 kegiatan
- Biaya MC Rp.800.000 untuk 2 kegiatan
- Belanja Sewa Meubel, Rp. 1.500.000 untuk 2 tempat (PPn sebesar 11% dan PPh 23 sebesar 2%);
- Belanja Makan/Minum Rp. 5.500.000 untuk makan prasmanan/kotak, 2 kegiatan (PPh 23 sebesar 2%);
- Pengganti Transportasi bagi peserta, Rp. 10.000.000 untuk 100 orang @Rp.100.000 per orang (untuk hari pertama 50 orang dan hari kedua 50 orang);
- ATK, cetak penggandaan (disiapkan oleh Sekretariat DPRD).

Anggota DPRD dan staf pendamping diberikan Perjalanan Dinas dan Dana Sosialisasi melalui transfer kepada staf pendamping atau pihak ketiga.

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan secara perorangan di daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.





**Jumat, 28 Juli 2023**

**13.00 - 16.10 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD MJP dilaksanakan di Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.**

**Sosialisasi diikuti oleh Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Desa Paniki Baru.**

**Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disosialisasikan adalah:**

- **Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

**DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan penjangkangan aspirasi publik pada penyusunan Ranperda berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis.**

**ANGGARAN/DANA SOSRANPERDA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA**

- **Biaya Narasumber Rp. 6.000.000 selama 6 jam untuk 2 kegiatan;**
- **Biaya Moderator, Rp. 1.400.000 untuk 2 kegiatan**
- **Biaya MC Rp.800.000 untuk 2 kegiatan**
- **Belanja Sewa Meubel, Rp. 1.500.000 untuk 2 tempat (PPn sebesar 11% dan PPh 23 sebesar 2%)**
- **Belanja Makan/Minum Rp. 5.500.000 untuk makan prasmanan/kotak, 2 kegiatan (PPh 23 sebesar 2%)**
- **Pengganti Transportasi bagi peserta, Rp. 10.000.000 untuk 100 orang @Rp.100.000 per orang (untuk hari pertama 50 orang dan hari kedua 50 orang);**

**ATK, cetak penggandaan disiapkan oleh Sekretariat DPRD. Setiap Anggota DPRD mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 370.000 (Daerah Minahasa Utara dan Bitung) serta uang representasi Rp. 75.000.**

**Pada Kegiatan SOSRANPERDA hari Jumat, (28/07/2023) telah digunakan anggaran sebagai berikut :**

- **Belanja Makan Minum (Makanan Kotak) Rp. 55.000 × 50 Orang = Rp. 2.750.000**
- **Jasa Sewa Meubel = Rp. 750.000**
- **Uang Transport Peserta Rp. 100.000 x 50 Orang = Rp. 5.000.000**
- **Narasumber = Rp. 2.700.000**
- **Moderator = Rp. 700.000**
- **MC = Rp. 400.000**

**Total : Rp. 12.300.000**



# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

JUMAT, 28 JULI 2023



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



**SENIN**

**31 JULI 2023**

**MJP** MELAYANI JUJUR PROGRESIF

Senin, 31 Juli 2023

Ibadah rutin Anggota DPRD bersama Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, di ruangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Mengawali kerja pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara di pekan berjalan ini dengan beribadah, berdoa dan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karuniaNya.

**Khadim oleh Pdt. Jimriv Pandeiroth, S.Th., MA**

**Tuhan memberkati Sulawesi Utara dan Indonesia !**



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116



Senin, 31 Juli 2023

13.00 - 16.30 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD MJP dilaksanakan di Desa Watudambo Dua Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disosialisasikan adalah:

- Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan penjangkangan aspirasi publik pada penyusunan Ranperda berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis.

**ANGGARAN/DANA SOSRANPERDA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA**

- \* Biaya Narasumber Rp. 6.000.000 selama 6 jam untuk 2 kegiatan;
- \* Biaya Moderator, Rp. 1.400.000 untuk 2 kegiatan
- \* Biaya MC Rp.800.000 untuk 2 kegiatan
- \* Belanja Sewa Meubel, Rp. 1.500.000 untuk 2 tempat (PPn sebesar 11% dan PPh 23 sebesar 2%)
- \* Belanja Makan/Minum Rp. 5.500.000 untuk makan prasmanan/kotak, 2 kegiatan (PPh 23 sebesar 2%)
- \* Pengganti Transportasi bagi peserta, Rp. 10.000.000 untuk 100 orang @Rp.100.000 per orang (untuk hari pertama 50 orang dan hari kedua 50 orang);

ATK, cetak penggandaan disiapkan oleh Sekretariat DPRD. Setiap Anggota DPRD mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 370.000 (Daerah Minahasa Utara dan Bitung) serta uang representasi Rp. 75.000.

Pada Kegiatan SOSRANPERDA hari Senin, (31/07/2023) telah digunakan anggaran sebagai berikut :

- \* Belanja Makan Minum (Makanan Kotak) Rp. 55.000 × 50 Orang = Rp. 2.750.000
- \* Jasa Sewa Meubel = Rp. 750.000
- \* Uang Transport Peserta Rp. 100.000 x 50 Orang = Rp. 5.000.000
- \* Narasumber = Rp. 2.700.000
- \* Moderator = Rp. 700.000
- \* MC = Rp. 400.000

Total : Rp. 12.300.000

Bersambung ●



# LAPORAN BULANAN PERIODE JULI 2023

SENIN, 31 JULI 2023



Melky Jakhin Pangemanan - MJP



melkypangemanan



0811 4341 116

